ANALISIS PENGARUH LUAS WILAYAH, JUMLAH TENAGA KERJA, IHK DAN PDRB PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH 34 PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Oleh:

FEBBI DANUTUTUR PAMUNGKAS

B300170180

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS PENGARUH LUAS WILAYAH, JUMLAH TENAGA KERJA, IHK DAN PDRB PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH 34 PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

FEBBI DANUTUTUR PAMUNGKAS

B300170180

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing

Eni Setyowati, S.E., M.Si

NIK. 726

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PENGARUH LUAS WILAYAH, JUMLAH TENAGA KERJA, IHK DAN PDRB PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH 34 PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020

OLEH

FEBBI DANUTUTUR PAMUNGKAS
B300170180

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 16 Juli 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. **Eni Setyowati, S.E., M.Si** ( )
   (Ketua Dewan Penguji)
2. **Ir. Maulidyah Indira Hasmarini, MP** ( )
   (Anggota I Dewan Penguji)
3. **Siti Aisyah, S.E., M.Si.** ( )
   (Anggota II Dewan Penguji)

Dekan,

Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, S.E., M.Si
NIDN. 0616087401

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 16 Juli 2022

Penulis

FEBBI DANUTUTUR PAMUNGKAS

B300170180

ANALISIS PENGARUH LUAS WILAYAH, JUMLAH TENAGA KERJA, IHK DAN PDRB PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH 34 PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020

Abstrak

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah dan harus diberdayakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi pengaruh luas wilayah, jumlah tenaga kerja, indeks harga konsumen, dan produk domestik regional bruto terhadap pendapatan asli daerah 34 Provinsi di Indonesia tahun 2020 dengan mengguanakan analisis regresi berganda *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil uji validitas pengaruh (uji *t*) menunjukkan bahwa tenaga kerja dan produk domestik regional bruto berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan variabel luas wilayah berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah. Sementara, indeks harga konsumen ditemukan tidak berpengaruh erhadap pendapatan asli daerah. Pemerintah Indonesia dan setiap daerah diharapkan mampu mendorong perekonomian serta menjaga stabilitas tingkat inflasi atau indeks harga konsumen di Indonesia. Harapanya inflasi yang terjadi sesuai dengan kebutuhan perekonomian nasional dan meningkatkan aktivitas perekonomian serta harga-harga barang dan jasa masih dapat dijangkau masyarakat.

Kata kunci: luas wilayah, jumlah tenaga kerja, indeks harga konsumen, produk domestik regional bruto, pendapatan asli daerah

Abstract

Regional original income is income obtained by the region which is collected based on regional regulations in accordance with applicable regulations. Regional original income is a source of income that comes from regional potential and must be empowered. This study aims to estimate the effect of area area, number of workers, consumer price index, and gross regional domestic product on local revenue of 34 provinces in Indonesia in 2020 by using Ordinary Least Square (OLS) multiple regression analysis. The results of the validity of the effect (t test) show that labor and gross regional domestic product have a positive effect on regional original income, while the area area variable has a negative effect on regional original income. Meanwhile, the consumer price index was found to have no effect on local revenue. The Indonesian government and each region are expected to be able to stimulate the economy and maintain stability in the inflation rate or consumer price index in Indonesia. It is hoped that inflation will occur in accordance with the needs of the national economy and increase economic activity and the prices of goods and services can still be reached by the public.

Keywords: area, number of workers, consumer price index, gross regional domestic product, local revenue.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan usaha-usaha untuk menaikkan taraf hidup suatu bangsa yang sering diukur dengan tingggi rendahnya pendapatan rill per kapita. Pelaksanaan pembangunan harus dilakukan secara komprehensif yang mencakup seluruh aspek ekonomi dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi konsekuensi dari pembangunan yang dilakukan secara massif ini akan membutuhkan dana yang sangat besar (Amalia et al., 2019).

Sebagaimana yang terdapat pada teori *big push*, di mana dalam teori ini menyatakan bahwa pemerataan pembangunan di semua bidang ekonomi dan semua wilayah akan membutuhkan dana besar sementara dana pembangunan yang dimiliki oleh pemerintahan pusat terbatas (Muchlisin et al., 2019).

Keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah pusat mendorong dilakukannya Undang-Undang otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah dan harus diberdayakan. Daerah tidak bisa hanya mengandalkan sumber dana dari pusat dikarenakan keterbatasan dana yang dimiliki. Daerah harus memaksimalkan pendapatan daerah mereka sendiri untuk mencukupi kebutuhan dana akan kebutuhan pengeluaran pembangunan daerah. Sehingga penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, harapannya adalah daerah mampu mandiri dalam melakukan pembangunan (Sukmawati & Ishak, 2019).

Indonesia di tahun 2020 memiliki pengeluaran pembangunan yang masih lebih besar daripada pendapatannya. Provinsi DKI Jakarta dengan tingkat PAD tertinggi sebesar 82.195.994 juta rupiah masih memiliki ketimpangan antara pendapatan asli dengan pengeluaran pemerintah sebesar 5.760.154 juta rupiah. Tabel di 1-2 juga memperlihatkan bahwa hampir di setiap provinsi memiliki pengeluaran yang jauh lebih banyak dan tidak sejalan dengan pendapatan asli daerah yang diperoleh.

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2020 (Juta Rupiah)

No.	PROVINSI	PAD	Pengeluaran Pemerintah
1	ACEH	13.977.581	15.798.122
2	SUMATERA UTARA	13.880.971	14.180.971
3	SUMATERA BARAT	6.987.606	7.364.942
4	RIAU	8.420.419	8.486.303
5	JAMBI	4.693.997	5.244.839
6	SUMATERA SELATAN	10.344.744	10.645.596
7	BENGKULU	3.368.877	3.490.757
8	LAMPUNG	6.941.828	7.195.028
9	KEP. BANGKA BELITUNG	2.301.338	2.489.646
10	KEP. RIAU	3.882.832	3.957.832
11	DKI JAKARTA	82.195.994	87.956.148
12	JAWA BARAT	41.583.153	46.095.261
13	JAWA TENGAH	28.301.075	29.106.574
14	DI YOGYAKARTA	6.130.178	6.673.341
15	JAWA TIMUR	33.028.697	35.232.562
16	BANTEN	12.609.363	13.264.391
17	BALI	6.605.532	7.360.707
18	NUSA TENGGARA BARAT	5.072.281	5.136.123
19	NUSA TENGGARA TIMUR	6.210.888	6.851.778
20	KALIMANTAN BARAT	6.332.880	6.632.880
21	KALIMANTAN TENGAH	4.829.733	5.062.890
22	KALIMANTAN SELATAN	7.230.905	7.580.905
23	KALIMANTAN TIMUR	8.763.477	9.214.806
24	KALIMANTAN UTARA	2.558.696	2.857.450
25	SULAWESI UTARA	4.105.706	4.558.858
26	SULAWESI TENGAH	4.267.856	4.594.377
27	SULAWESI SELATAN	8.978.369	9.302.369
28	SULAWESI TENGGARA	4.432.855	5.783.129
29	GORONTALO	1.719.762	1.719.762
30	SULAWESI BARAT	1.951.548	2.019.077
31	MALUKU	3.373.516	3.380.216
32	MALUKU UTARA	2.795.699	3.360.171
33	PAPUA BARAT	9.120.609	9.371.589
34	PAPUA	14.602.975	15.197.966

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau besar dan pulau kecil disekitarnya. Indonesia terbagi menjadi 34 provinsi dan masing masing provinsi atau daerah memiliki potensi daerah dan keunggulan dalam beberapa aspek pendapatannya. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah perwujudan

dari penggalian potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari ekonomi asli daerah (Syamsul & Irma, 2020).

Menurut Rahmadi & Parmadi (2019), ketimpangan antara pendapatan asli daerah dengan pengeluaran pembangunan pemerintah ini artinya masih dibutuhkan kekurangan dana untuk melaksanakan pembangunan di daerah. Apalagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, di mana "Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan". Hal ini menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk bisa memberdayakan potensi ekonomi yang dimiliki dengan tujuan supaya dari potensi ekonomi tersebut dapat memaksimalkan pendapatan asli daerahnya. Karena dengan demikian daerah mampu mandiri dan bisa membiayai kebutuhan pembangunannya sendiri serta tidak tergantung pada pusat.

Luas wilayah merupakan kesatuan geografis dari suatu daerah beserta seluruh unsur yang terkait terhadap batas dan sistem yang berlaku yang ditentukan berdasarkan aspek administrastif serta aspek fungsional yang dimiliki. Jika suatu daerah mempunyai wilayah yang cukup luas, maka akan menghabiskan biaya pembangunan yang tidak sedikit. Sehingga jika daerah tersebut ingin maju dan sejahtera, maka pemerintah daerah harus menyediakan anggaran yang banyak untuk dapat melakukan pembangunan (Marseno & Mulyani, 2020).

Mankiw (2007) menyebutkan input tenaga kerja terdiri dari kuantitas dan keterampilan tenaga kerja. Tenaga kerja yang diserap oleh sektor perekonomian pada suatu daerah akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Apabila sektor perekonomian yang ada pada daerah mampu menyerap tenaga kerja yang tersedia tentunya akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Indeks harga konsumen adalah indeks yang menggambarkan perubahan harga berbagai barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat secara umum atau merupakan angka yang menggambarkan perbandingan harga konsumen pada suatu periode tertentu. Jika harga terus naik dan tidak terkendali, maka menyebabkan inflasi, maka daya beli masyarakat akan menurun, sehingga pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah secara langsung juga akan terpengaruh (Afiyah, 2011).

Menurut Rakhmadhani (2018) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempunyai dampak positif bagi aktifitas perekonomian daerah. Jika aktifitas ekonomi pada sektor itu terjadi kenaikan, berpengaruh terhadap besaran pendapatan asli daera, karena beberapa sektor domestik dapat digunakan untuk mengukur atau mengestimasi pada peningkatan pendapatan asli daerah secara langsung, artinya setiap adanya kenaikan PDRB maka akan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap PAD didalam pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, menjadikan penulis untuk melakukan penelitian tentang bagaimana luas wilayah, jumlah tenaga kerja, IHK, dan PDRB mempengaruhi pendapatan asli daerah melalui penelitian yang berjudul "Analisis Pengaruh Luas Wilayah, Jumlah Tenaga Kerja, IHK dan PDRB Pada Pendapatan Asli Daerah 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2020".

2. METODE

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berbentuk data *cross section*. Data-data yang dimaksud antara lain luas wilayah, jumlah tenaga kerja, indeks harga konsumen (IHK) dan produk domestik regional bruto (PDRB), di 34 Provinsi di Indonesia tahun 2020. Data-data tersebut diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik.

Alat analisis yang digunakan untuk menganalisis pengaruh luas wilayah, jumlah tenaga kerja, indeks harga konsumen (IHK) dan produk domestik regional bruto (PDRB) mempengaruhi pendapatan asli daerah provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2020 adalah model analisis regresi linier berganda dengan metode *ordinary least square* (OLS). Formulasinya adalah sebagai berikut (Gujarati & Porter, 2012):

$$\log PAD_i = \beta_0 + \beta_1 \log LW_i + \beta_2 \log TK_i + \beta_3 \log IHK_i + \beta_4 \log PDRB_i + \varepsilon_i \qquad (1)$$

Keterangan:

PAD	: Pendapatan asli daerah (ribu rupiah)
LW	: Luas wilayah (km^2)
TK	: Jumlah tenaga kerja (orang)
IHK	: Indeks harga konsumen (persen)
PDRB	: Produk domestik regional bruto (miliar rupiah)
log	: Operator Logaritma

i : *Cross section*
ε : *error term*

Tahapan estimasi model ekonometrik akan meliputi: estimasi parameter model ekonometrik: uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolinieritas, uji normalitas residual, uji heteroskedastisitas, uji spesifikasi model, uji kebaikan model, dan uji validitas pengaruh variabel independen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Estimasi

Tabel 2. Hasil Estimasi Model Ekonometrik

$\log PAD_i$ = 6,753 - 0,155 $logLW_i$ + 0,274 $logTK_i$ + 0,645 $\log IHK_i$ + 0,768 $\log PDRB_i$ (0,001)* (0,014)** (0,679) (0,000)*
R^2 = 0,945; DW = 1,421; F = 124,820; Prob F = 0,000
Uji Diagnosis **1. Multikolinieritas (VIF)** logLW = 1,028; logTK = 4,227; logIHK = 1,048; logPDRB = 4,276 **2. Normalitas (Jarque-Bera)** JB = 0,552; Prob. JB = 0,758 **3. Heteroskedastisitas (White-no cross term)** $\chi^2(4)$ = 3,810; Prob. (4) = 0,432 **4. Linieritas (Ramsey RESET)** F (2,27) = 1,065; Prob. F (2,27) = 0,359
Sumber: Lampiran 2. Keterangan: *Signifikan pada α 0,01; **Signifikan pada α 0,05; ***Signifikan pada α 0,10. Angka dalam kurung adalah signifikansi (*p value*) t statistik

3.2 Uji Asumsi Klasik

3.2.1 Uji Multikolinieritas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	VIF	Kriteria	Kesimpulan
LOG(LW)	1,028	>10	Tidak Menyebabkan multikolinieritas
LOG(TK)	4,227	>10	Tidak Menyebabkan multikolinieritas
LOG(IHK)	1,048	<10	Tidak Menyebabkan multikolinieritas
LOG(PDRB)	4,276	<10	Tidak Menyebabkan multikolinieritas

Tabel 3 menunjukkan VIF semua variabel independen > 10. Dapat disimpulkan bahwa pada model ini tidak terdapat multikolinearitas yang serius.

3.2.2 Uji Normalitas Residual

Dari Tabel21, terlihat probabilitas stastistik *JB* sebesar 0,758 (> 0,10); jadi H_0 diterima. Simpulan, distribusi residual model terestimasi normal.

3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Dari Tabel.2, terlihat probabilitas stastistik χ^2 0,432 (> 0,10); jadi H_0 diterima. Simpulan, tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model terestimasi.

3.2.4 Uji Spesifikasi Model

Dari Tabel 2, terlihat probabilitas statistik F uji Ramsey Reset memiliki nilai sebesar 0,359 (> 0,10); jadi H_0 diterima. Simpulan, spesifikasi model terestimasi tepat atau linier.

3.3 Uji Kebaikan Model

3.3.1 Uji Eksistensi Model (Uji F)

Dari Tabel 2, terlihat probabilitas stastistik *F* estimasi model ekonometrik memiliki nilai 0,000 (< 0,01); jadi H_0 ditolak. Simpulan, model terestimasi eksis.

3.3.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Dari Tabel 21 terlihat R^2 memiliki nilai sebesar 0,945 artinya 94,5% variasi pendapatan asli daerah dapat dijelaskan oleh variabel luas wilayah, jumlah tenaga kerja, indeks harga konsumen, dan produk domestik regional bruto. Sisa-nya, sebesar 5,5% dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model estimator.

3.4 Uji Validitas Pengaruh

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Indepeden

Variabel	Prob.t	Kriteria	Kesimpulan
LOG(LW)	0,001	< 0,01	Signifikan pada α = 0,01
LOG(TK)	0,014	< 0,05	Signifikan pada α = 0,05
LOG(IHK)	0,679	> 0,10	Tidak Signifikan
LOG(PDRB)	0,000	< 0,01	Signifikan pada α = 0,01

3.5 Interpretasi Pengaruh Variabel independen

Berdasarkan Tabel 4, terlihat bahwa variabel yang memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah adalah luas wilayah, jumlah tenaga kerja, dan produk domestik regional bruto, sedangkan indeks harga konsumen ditemukan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah 34 Provinsi di Indonesia tahun 2020.

Variabel luas wilayah memiliki koefisien regresi sebesar -0,155 dengan pola hubungan antara luas wilayah dengan pendapatan asli daerah adalah logaritma-logaritma, sehingga apabila luas wilayah naik sebesar 1%, maka pendapatan asli daerah akan turun sebesar 0,155%. Sebaliknya, apabila luas wilayah turun sebesar 1% maka pendapatan asli daerah akan naik sebesar 0,155%.

Variabel tenaga kerja memiliki koefisien regresi sebesar 0,274 dengan pola hubungan antara tenaga kerja dengan pendapatan asli daerah adalah logaritma-logaritma, sehingga apabila tenaga kerja naik sebesar 1%, maka pendapatan asli daerah juga akan naik sebesar 0,274%. Sebaliknya, apabila tenaga kerja turun sebesar 1% maka pendapatan asli daerah juga akan turun sebesar 0,274%.

Variabel produk domestik regional bruto memiliki koefisien regresi sebesar 0,768 dengan pola hubungan antara produk domestik regional bruto dengan pendapatan asli daerah adalah logaritma-logaritma, sehingga apabila produk domestik regional bruto naik sebesar 1%, maka pendapatan asli daerah akan turun sebesar 0,768%. Sebaliknya, apabila produk domestik regional bruto turun sebesar 1% maka pendapatan asli daerah akan naik sebesar 0,768%.

D. Interpretasi Ekonomi

Hasil regresi dalam penelitian ini menyatakan bahwa luas wilayah berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian, jika luas wilayah menurun justru akan meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Hal ini terjadi karena pembukaan lahan biasanya akan membutuhkan perizinan di wilayah yang bersangkutan, sehingga daerah tersebut akan mendapatkan sumber-sumber penerimaan melalui pajak ataupun izin usaha yang dibuka masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Marseno & Mulyani (2020) yang menyatakan luas wilayah berpengaruh negatif terhadap pendapatan daerah dan belanja modal. Sari & Ningsih (2019) dan Taroreh et al. (2022), dalam penelitiannya juga menemukan hal serupa yaitu naiknya wilayah administrasi justru menambah biaya pembangunan yang bersumber dari pendapatan asli daerah.

Berdasarkan hasil uji validitas pengaruh, jumlah tenaga kerja ditemukan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Tenaga kerja merupakan tenaga pendorong utama dalam perekonomian di suatu daerah. Jika penyerapan

tenaga kerja meningkat, maka sumber penerimaan daerah juga akan bertambah melalui pajak pendapatan dan pajak konsumsi masyarakat. Hasil penelitian ini sesuai dengan temuan Kurniawan et al. (2018) yang menyatakan bahwa naiknya jumlah tenaga kerja di sektor formal telah meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kutai Barat. Marlina & Pebrina (2019) dalam penelitiannya juga menemukan pengaruh positif dari tenaga kerja terhadap pendapatan daerah Provinsi Jambi selama tahun 2012-2016.

Hasil dalam penelitian ini menyatakan indeks harga konsumen tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hasil ini sejalan dengan temuan Oktiani et al. (2021) di mana indeks harga konsumen yang merupakan sebagai indikator inflasi tidak berpengaruh terhadap pendapatan daerah karena berbagai program bantuan pemerintah dalam menjaga stabilasi harga mampu menjaga daya beli masyarakat. Hasil penelitian lain yang mendukung hasil penelitian ini adalah Priyono & Handayani (2021) dan Daffa et al. (2022), di mana hasil dalam temuan mereka menyatakan bahwa indeks harga konsumen tidak berpengaruh terhadap pendapatan daerah.

Produk domestik regional bruto berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah 34 Provinsi di Indonesia tahun 2020. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang terjadi sejalan dengan peningkatan penerimaan daerah. Naiknya aktivitas perekonomian secara langsung dapat memberikan pemerintah daerah sumber penerimaan baru melalui pajak pendapatan, retribusi, pajak konsumsi karena pertumbuhan ekonomi biasanya juga meningkatkan tingkat konsumsi yang terjadi di masyarakat, sehingga pendapatan asli daerah juga akan naik. Hasil penelitian ini didukung oleh beberapa temuan yang juga menemukan pengaruh positif dari naiknya produk domestik bruto terhadap pendapatan asli daerah (Latif et al., 2017; Darmi, 2018; Swantara & Darsana, 2017).

4. PENUTUP

Berdasarkan estimasi regresi *Ordinary Least Square* (OLS) pada bab IV maka, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Hasil uji asumsi klasik menyatakan nilai probabilitas pada uji normalitas residual menunjukkan data berdistribusi residual model terestimasi normal. Pada uji heteroskedastisitas tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model terestimasi. Pada uji spesifikasi model adalah spesifikasi model terestimasi tepat atau linier.
b. Berdasarkan Uji eksistensi model (Uji *F*), model yang digunakan eksis dengan R^2 sebesar 0,945 artinya 94,5% variasi pendapatan asli daerah dapat dijelaskan oleh variabel luas wilayah, jumlah tenaga kerja, indeks harga konsumen, dan produk domestik regional bruto. Sisa-nya, sebesar 5,5% dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model estimator.
c. Hasil uji validitas pengaruh (Uji *t*) menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja dan produk domestik regional bruto berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan variabel luas wilayah berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah 34 Provinsi di Indonesia tahun 2020.

Adapun saran yang diberikan oleh peneliti kepada pemerintahan Indonesia terkait posisi cadangan devisa nasional antara lain:

a. Pemerintah Indonesia diharapkan mampu mendorong perekonomian nasional serta menjaga stabilitas inflasi atau indeks harga konsumen di Indonesia.
b. Pemerintah juga diharapkan dapat menggali sektor-sektor perekonomian baru di setiap wilayah karena banyak wilayah di pelosok di Indonesia yang masih kesulitan akan akses infrastruktur jalan tetapi memiliki potensi wisata yang menawan dan menjanjikan. Jika diperlukan pemecahan wilayah dapat dilakukan untuk pengelolaan kewilayahan dan perekonomian yang lebih baik.
c. Pemerintah dapat meningkatkan kualitas angkatan kerja dengan membekali mereka dengan ketrampilan khusus, sehingga mereka mampu bersaing di pasar tenaga kerja dan saat bekerja mampu meningkatkan produktivitas serta output produksi, sehingga perekonomian juga naik dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai.
d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan beberapa variabel lain agar pendapatan asli daerah di tiap wilayah di Indonesia dapat diketahui potensi serta ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Afiyah, S. N. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Laju Inflasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto tahun 1998-2008 Menggunakan Program Minitab 14. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia*, *5*(2), 52–59.

Amalia, C. R., Susilowati, D., & Sudarti. (2019). Pengaruh Upah Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota Di Jawa Timur Tahun 2011-2015. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, *3*(2), 178–193.

Anny Widiasmara. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Total Aset dan Luas Wilayah, terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, *2*(1), 45–56.

Asmuruf, Makdalena F Rumate, V. A., & Kawung, G. M. V. (2015). Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah Pendudukterhadap Pendapatanasli Daerah (Pad)Di Kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *15*(05), 732.

AZ, S. M., & Pebrina, S. (2019). Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Pendapatan Asli Daerah dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Provinsi Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, *3*(1), 36. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v3i1.54

Azizah, E. W., Sudarti, & Kusuma, H. (2018). The Influence of Education, Income Per Capita and Population Against Poverty in East Java Province. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, *2*(1), 167–180. http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/view/6976

Daffa, M., Soeroso, T., Pelita, U., & Medan, H. (2022). *DAN INFLASI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN (PAD)*. 17–24. https://doi.org/10.47709/ijbl.v1.n1.1295

Darmi, T. (2018). Locally-Generated Revenue as A Capacity Parameters of New Regional Autonomy Management. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, *22*(1), 1. https://doi.org/10.22146/jkap.24870

Hidayat, A. S., & Nalle, F. W. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah, Tenaga Kerja, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *15*(1), 71. https://doi.org/10.22219/jep.v15i1.464

Karlina, B. (2017). Pengaruh Tingkat Inflasi, Indeks Harga Konsumen Terhadap PDB di Indonesia Pada Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, *6*(1), 2252–6226. http://fe.budiluhur.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/b.-berlian.pdf

Khoir, F., Ani, H. M., & Hartanto, W. (2018). Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011-2017.

JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial, *12*(2), 199. https://doi.org/10.19184/jpe.v12i2.8320

Kristinae, V. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Harga Konsumen Terhadap Inflasi (Studi Kasus Pada Inflasi Kota Palangka Raya dan Kab . Sampit di Kalimantan Tengah). *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis*, *3*(1), 1–11.

Kurniawan, A. I., Militina, T., & Suharto, R. B. (2018). Pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah serta tenaga kerja terhadap pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi. *Inovasi*, *13*(2), 82. https://doi.org/10.29264/jinv.v13i2.2453

Latif, M., Syaparuddin, & Achmad, E. (2017). Hubungan belanja daerah , PMDN , PMA , tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi (Pendekatan Kausalitas. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, *6*(2), 85–96.

Mamonto, W. S. (2013). Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Tenaga Kerja Pengaruhnya Terhadap Pdrb Kota Kotamobagu Periode 2002-2011. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *1*(4). https://doi.org/10.35794/emba.v1i4.2893

Marseno, B., & Mulyani, E. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Penduduk Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *2*(4), 3452–3467. https://doi.org/10.24036/jea.v2i4.295

Meianto, E., Betri, & Wenny, C. D. (2013). *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan*. 1–13.

Muchlisin, M. R., Purnamaningsih, N., & Juwarni, D. (2019). Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 – 2018. *JIMEK : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, *2*(1), 150–168.

Ngurah, I. P., & Kartika, P. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, *1*, 79–92.

Oktiani, A., Studi, P., Pembangunan, E., & Baturaja, U. (2021). *PENGARUH JUMLAH PENDUDUK DAN INFLASI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*. *1*(1), 16–35.

Priyono, D., & Handayani, H. R. (2021). *TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN EKS KARISIDENAN PATI TAHUN 2012 - 2018*. *10*, 1–10.

Rahmadi, S., & Parmadi, P. (2019). Pengaruh ketimpangan pendapatan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan Ekonomi antar Pulau di Indonesia.

Jurnal Paradigma Ekonomika, *14*(2), 55–66. https://doi.org/10.22437/paradigma.v14i2.6948

Rakhmadhani, M. R. (2018). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Kesenjangan Antar Daerah Dan Pembiyaan Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembanguna Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, *2*(2), 309–319.

Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, *5*(1), 81. https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455

Sari, I. P., Sttd, P. T. D. I., Raya, J., No, S., Cibitung, K., Bekasi, K., & Barat, J. (2019). Determinan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor IKM Agro di Kabupaten Bangkalan. *MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*, *14*(2), 95–101. https://doi.org/10.29244/mikm.14.2.95-101

Sari, N., Yulmardi, & Bhakti, A. (2016). Pengaruh pertumbuhan ekonomi , pertumbuhan penduduk dan produktivitas tenaga kerja terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Jambi. *E-Jurnal Ekonomi Dan Sumberdaya Dan Lingkungan*, *5*(1), 33–41.

Sari, P., & Ningsih, N. H. (2019). Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal Melalui Pad, Dau, Dan Dak Sebagai Variabel Intervening. *AKUNTABILITAS: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, *12*(2), 99–112. https://doi.org/10.29259/ja.v12i2.9311

Sartika, D., Ulfa, A., & Ilyas, A. (2019). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, *21*(1), 32–53.

Suciaty, S. E., & Nur, S. (2018). *Analisa Indeks Gini di Kota Malang*. *Vol.1 No.*, 122–133.

Sukmawati, M., & Ishak, J. F. (2019). Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. *In Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, *10*(1), 1056–1068.

Suwandika, P. E., & Yasa, I. N. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, *4*(7), 794–810.

Swantara, I. K. B. P., & Darsana, I. B. (2017). Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Pendapatan PHR, dan Penerimaan Retribusi Obyek Wisata terhadap PAD Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal EP Unud*, *6*(12), 2551–2582.

Syahputra, R. (2017). Analisis Derajat Desentralisasi atau Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Aceh Tamiang. *Jurnal Samudra Ekonomika*, *1*(1), 12–21.

Syamsul, S., & Irma, I. (2020). Pendapatan Asli Daerah (Pad): Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Banggai Laut. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, *15*(4), 553. https://doi.org/10.32400/gc.15.4.30137.2020

Tahar, Afrizal dan Zakhiya, M. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Akutansi Dan Investasi*, *12*(1), 88–99.

Taroreh, G., Elim, I., Tangkuman, S., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Ratulangi, U. S. (2022). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Analysis of the Effectiveness and Contribution of Parking Taxes to Manado City ' s Original Revenue*. *5*(2), 1–4.

Widodo, W. I., & Guritno, B. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restauran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Yogyakarta. *Junal Visi Manajemen*, *2*(2), 128–138. http://stiepari.greenfrog-ts.co.id/jurnal/index.php/JVM/article/view/79/82